

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional. Masalah yang dihadapi banyak negara dan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah disetiap negara adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi nasional suatu negara dan juga dipengaruhi oleh perkembangan dan situasi ekonomi global. Dalam hal ini, meningkatnya globalisasi ekonomi dan tingkat ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan terkait kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung risiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia.

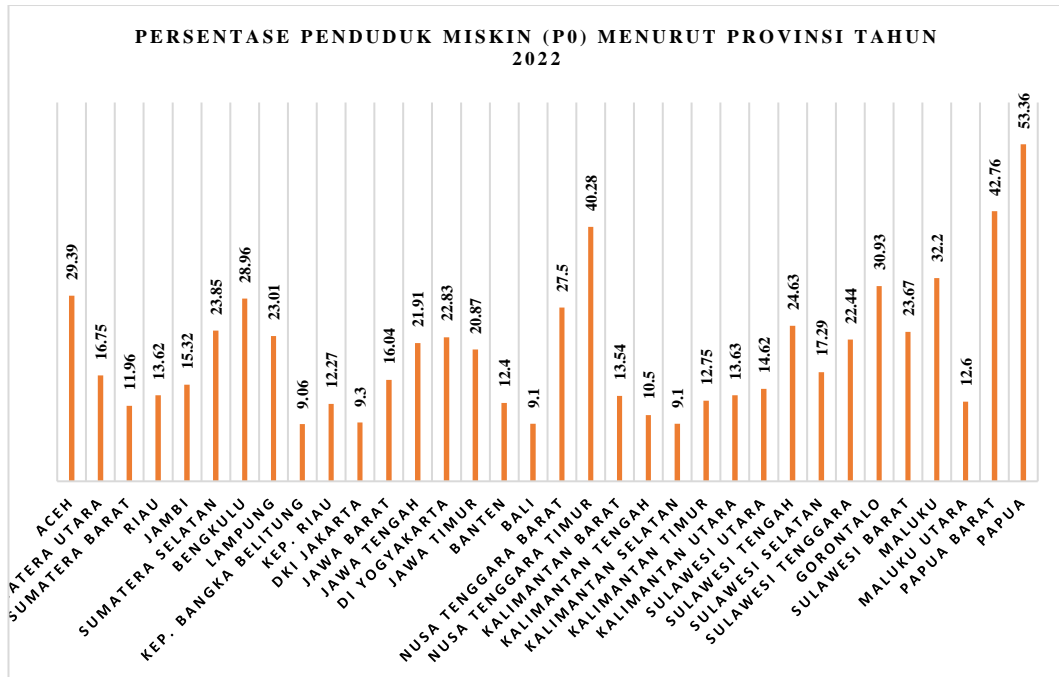
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menndapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya. Kurnarjo berpendapat dalam Badrul Munir (2002:10) bahwa pada umumnya, suatu negara dapat dikatakan miskin apabila pendapatan perkapita

yang terhitung rendah, tingginya tingkat pertumbuhan dengan perhitungan lebih dari 2% per tahun, tenaga kerja yang sebagian bergerak dalam sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran kemiskinan. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta cepat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan. Di Indonesia, kemiskinan merupakan permasalahan yang telah dihadapi sejak lama dan sampai saat ini masih menuntut perhatian lebih dari Pemerintah Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia masih relatif cukup tinggi dibandingkan dengan negara di sekitarnya.

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus-menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan ekonomi dijadikan bahan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya yang dapat mengelola sumber daya atau potensi yang ada di daerahnya masing-masing, dan membentuk kerjasama dengan sektor swasta sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat merangsang perkembangan dalam melakukan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah khususnya daerah yang relatif mempunyai tingkat

kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Pembangunan daerah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.



Sumber: Badan Pusat Statistik RI, 2022

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2022

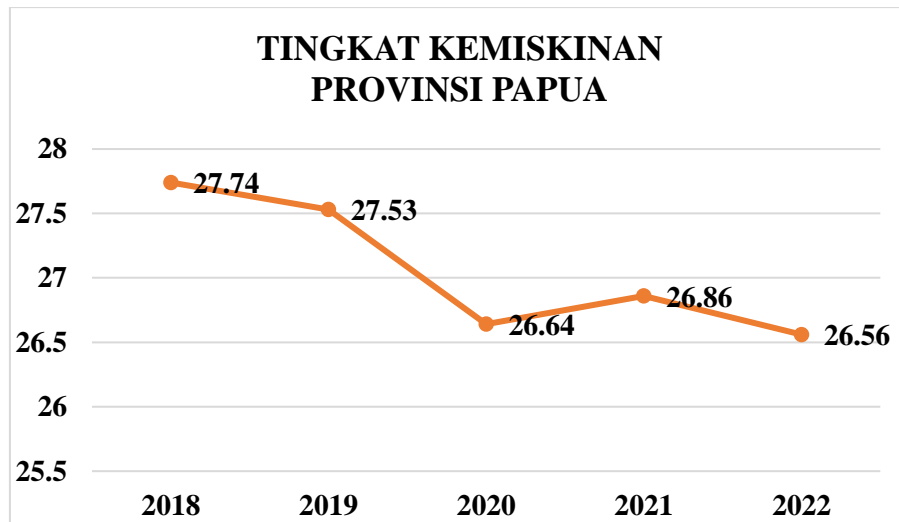
Dilihat dari gambar diatas, angka kemiskinan nasional tidak mencerminkan realita di setiap provinsi. Pada tahun 2022, dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di antara semua provinsi di Indonesia. Kondisi sebagian besar alam di Provinsi Papua tandus dan gersang. Kekeringan dan rawan pangan seolah menjadi bencana rutin yang dihadapi warga di Provinsi Papua hampir setiap tahun. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai pada akhirnya

menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan itu. Sumber daya alam yang cukup besar dan beragam tersebar di setiap daerah, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah Provinsi Papua. Hal ini sebabkan karena ketimpangan pemerataan pembangunan, Presiden Joko Widodo mengakui bahwa adanya ketimpangan pemerataan pembangunan, beliau mengatakan bahwa ketimpangan sangat jelas sekali di Provinsi Papua (Bappeda, 2018).

Sejak tahun 2001, Pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Papua melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua. Sehubungan dengan pemberlakuan otonomi khusus tersebut, Pemerintah Provinsi Papua menerima dana otsus sejak tahun 2002 dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sejak tahun 2006. Total dana otsus dan DTI bagi Provinsi Papua sejak awal diberikan hingga tahun 2017 adalah sebesar 89.86 triliun rupiah (KEMENKEU, 2019). Pemanfaatan dana otsus terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sedangkan DTI untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi salah satu persoalan mendasar dan menjadi pusat perhatian di negara manapun (Sanjaya, 2019). Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah tingginya ketimpangan antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin meluas. Masalah kemiskinan ini hampir terjadi di setiap provinsi di Indonesia salah

satunya adalah Provinsi Papua. Berikut merupakan perkembangan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Papua.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2 Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Dilihat dari gambar diatas, bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih tinggi. Minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menjadi penyebab kemiskinan. Maka diperlukan data yang akurat untuk membangun masyarakat di Provinsi Papua. Salah satu indikator masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua sementara pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan yaitu karena lambannya pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan (Badan Pusat Statistik).

Kebijakan pembangunan ekonomi disuatu negara maupun daerah salah satunya meningkatkan investasi. Sukirno (2005) menjelaskan bahwa dengan investasi akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Nilai investasi di Provinsi

Papua sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 2.800.828,90 juta (DPMPTSP Provinsi Papua, 2022). Hal ini membuktikan bahwa untuk menjalankan roda perekonomian pemerintah membutuhkan modal yang diantaranya didapat dari potensi ekonomi daerah serta transfer yang diberikan dari pemerintah pusat (Hendra, 2016).

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai strategi untuk pengentasan kemiskinan, seperti perlindungan sosial yang komprehensif, penyediaan dan peningkatan akses layanan dasar, dan memperluas mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan. Berbagai usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia beberapa tahun belakangan ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan nasional.

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang (BPS, 2016), untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan angka pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil satu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2010).

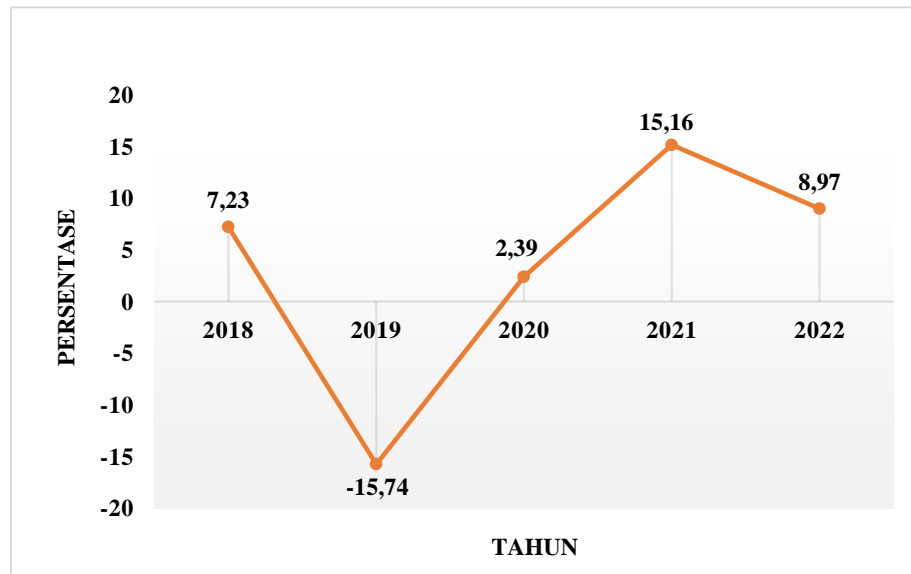
Arus globalisasi ekonomi perdagangan terus berkembang memberikan pengaruh serta hambatan terhadap aktivitas perdagangan yang harus dihadapi oleh semua negara termasuk Indonesia. Perekonomian global yang terintegrasi, spesialisasi dalam perdagangan merupakan strategi yang semakin menonjol

(Coxhead and Li, 2008). Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Proses pembangunan memerlukan pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing wilayah mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga mampu mengurangi kemiskinan. Secara langsung, hal ini menunjukkan pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi disektor-sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Dwi Wahyuniarti, 2008).

Data produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan indikator penting untuk mengetahui suatu kondisi di wilayah dalam satu periode. Jika PDRB semakin tinggi pada suatu daerah, maka potensi daerah tersebut akan semakin besar. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan di suatu wilayah dalam mendorong peningkatan *output* daerah didedikasikan dari perkembangan PDRB.

Menurut Asiyon, S (2013) pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan struktur perekonomian nasional maupun regional dalam menuju perekonomian yang seimbang dan dinamis, yang bercirikan industri yang kuat, maju, dan pertanian yang tangguh. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun suatu negara dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan.

Berikut ini gambaran laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua selama tahun 2018-2022 tersaji dalam sebuah grafik:



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.3, terlihat pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan mencapai -15,74 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 mulai terjadinya wabah Covid-19 yang menyebabkan semua sektor khususnya perekonomian terdampak. Namun ditahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi 2,39 persen dan dilanjut di tahun 2021 naik menjadi 15,16 persen, hal ini memberikan gambaran adanya perekonomian yang cukup kuat, dimana masyarakat masih mampu bertahan di tengah terjadinya Covid-19.

Agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat maka perlu diketahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yaitu investasi.

Investasi ini perlu ditingkatkan agar berbagai permasalahan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi bisa teratasi. Adanya investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, modernisasi, pertumbuhan pendapatan, ketenagakerjaan, pengurangan kemiskinan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pada kenyataannya investasi merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Adnan, 2010). Investasi memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penting untuk menentukan strategi investasi yang akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Triyodo, 1996).

Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya *et. al.*, 2012). Penambahan stok bangunan dan peralatan penting lainnya akan meningkatkan output potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal untuk barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno 2000). Investasi dalam bidang perekonomian berpengaruh serta mendorong naik turunnya tingkat perekonomian dari suatu negara, kondisi ini terjadi karena dengan adanya investasi akan terjadi peningkatan produksi dan kesempatan kerja. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan secara keseluruhan untuk mendirikan atau memperluas usaha yang telah ada, dimana investasi ini nantinya memiliki tujuan yang dapat memberikan atau memperoleh keuntungan bagi para investor maupun pemerintah.

Investasi merupakan pendorong utama dalam menaikkan output secara signifikan. Provinsi Papua mempunyai dua sumber investasi, yang pertama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menjadi sumber yang diberikan oleh pemerintah untuk kontribusi yang besar terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah.

Tabel 1. 1 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Tahun	PMDN (Juta Rupiah)
2018	10.462.000
2019	149.034.958
2020	2.722.182
2021	910.844
2022	1.311.755

Dilihat dari tabel 1.1, perkembangan realisasi PMDN selama 5 tahun dari 2018-2022 mengalami laju pertumbuhan yang tidak stabil setiap tahunnya. Nilai realisasi investasi yang meningkat di tahun 2019 memperteguh komitmen Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mencapai enam indikator kinerja utama yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yakni eksekusi realisasi investasi besar yang dilakukan dengan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, serta penyebaran investasi berkualitas dengan promosi investasi yang berfokus berdasarkan sektor dan negara, dan mendorong peningkatan realisasi investasi PMDN (Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM dalam Konferensi pers di kantor BKPM. Jakarta, 2020). Lalu pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena dampak dari Covid-19.

Sumber investasi yang kedua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan nasional secara menyeluruh.

**Tabel 1. 2 Penanaman Modal Asing di Provinsi Papua
Tahun 2018-2022**

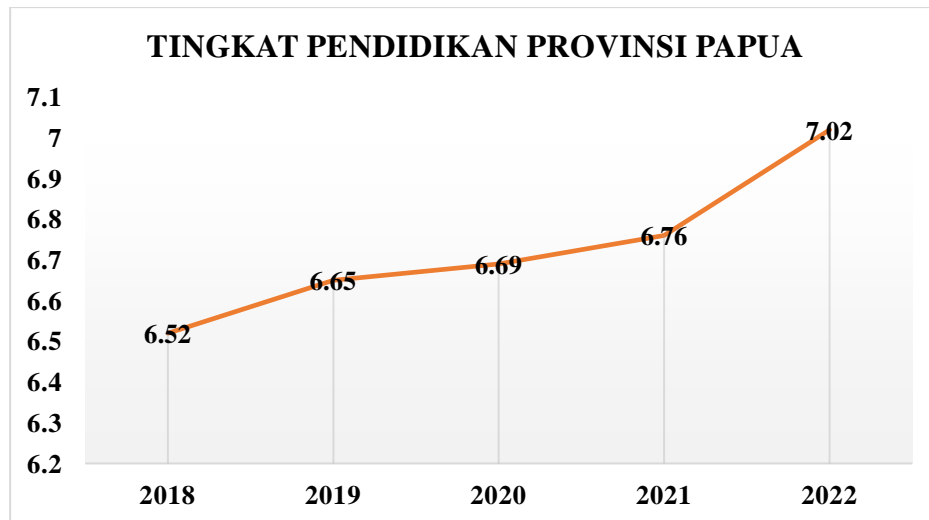
Tahun	PMA (Juta Rupiah)
2018	1.132.270
2019	2.912.243.514
2020	567.671
2021	1.489.073
2022	1.489.073

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan angka yang tidak stabil. PMA terendah berada pada tahun 2020, faktor utamanya sangat jelas yaitu karena Covid-19, dimana jalur perdagangan duniapun ditutup. Namun ditahun berikutnya, pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya mampu menarik kembali minat investor.

Masalah kemiskinan juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkualitas dimana hal ini dapat diukur oleh kondisi pendidikan dan kesehatan. Todaro (2006) menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan dasar di suatu daerah. Selain sebagai pilar dalam menciptakan modal manusia (*human capital*), kesehatan dan pendidikan juga merupakan inti dari kesejahteraan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan berperan penting untuk menyerap kemajuan teknologi dan memperluas kapasitas sehingga ekonomi tumbuh positif dan terwujudnya

pembangunan berkelanjutan. Dengan pendidikan maka masyarakat lebih berpeluang untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik.



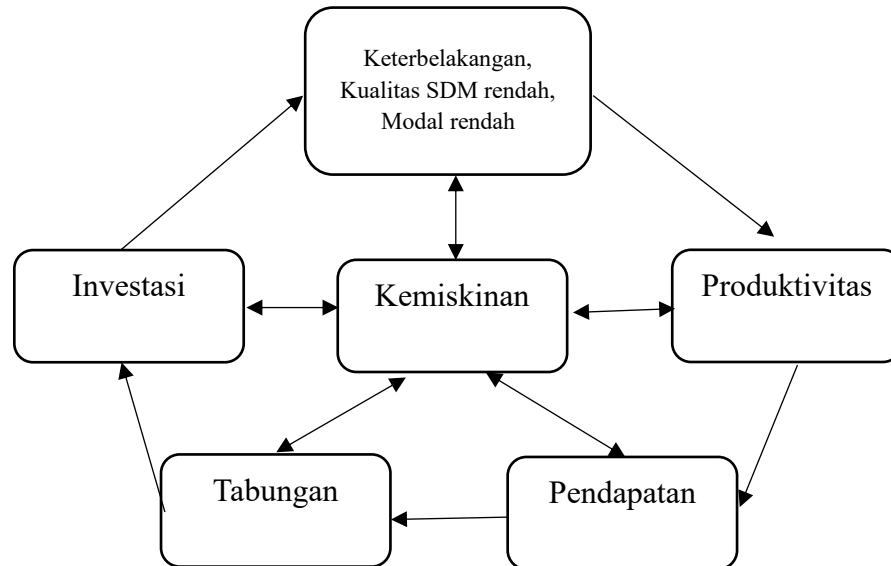
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4 Tingkat Pendidikan di Provinsi Papua Berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2018-2022

Kondisi pendidikan di Provinsi Papua setiap tahunnya cenderung meningkat. Meskipun pendidikan di Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun ada beberapa daerah di Provinsi Papua yang tidak merata. Hal ini berarti pendidikan di Provinsi Papua masih tergolong rendah.

Nurkse (Kuncoro, 2006) menggambarkan dalam teori lingkaran kemiskinan bahwa keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Selanjutnya, apabila pendapatan yang diterima rendah, akan mengakibatkan rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi disini bisa berupa investasi sumber daya manusia

yaitu dengan ukuran pendidikan, maupun investasi kapital dengan ukuran konsumsi.



Gambar 1. 5 Teori Lingkaran Nurkse

Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan tersebut dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya konsumsi. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dan kajian mengenai sebab-sebab kemiskinan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Keterbelakangan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan produktivitas menurun karena rendahnya aktivitas *supply* dan *demand* pada pasar tenaga kerja, sebagai akibat tidak bertemunya permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, semakin rendah pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka masyarakat tidak mempunyai dana untuk

ditabung maupun diinvestasikan yang akhirnya menimbulkan tingkat *saving* dan tingkat investasi rendah. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan modal yang tinggi. Sebaliknya, jika tingkat modal rendah maka akan sulit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterbelakangan. Dalam lingkaran ini kemiskinan diposisikan sebagai sebab sekaligus akibat dari terjadinya fenomena kemiskinan itu sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Masalah kemiskinan masih menjadi polemik bersama terutama bagi Indonesia dan Provinsi Papua. Maka dari itu penulis mengambil judul **Pengaruh Investasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Intervening* di Provinsi Papua.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah untuk menganalisis Pengaruh Investasi dan Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Intervening* di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua?

4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua?
5. Bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua?
6. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua?
7. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
5. Untuk mengetahui pengaruh laju pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.
6. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan melalui laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

7. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan melalui laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, manfaat yang diharapkan yaitu:

1.4.1 Bagi Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam menanggulangi kemiskinan serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Papua.

1.4.2 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya tentang pengaruh investasi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* di Provinsi Papua serta bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.4.3 Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai pengaruh investasi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* di Provinsi Papua.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian dan jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan pengambilan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan sumber relevan lainnya yang menyajikan data valid mengenai perekonomian di Indonesia dalam keuangan daerah.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak keluarnya Surat Keputusan pada bulan September 2023, yang diawali dengan pengajuan judul, pengumpulan data, seminar usulan penelitian, menganalisis data, penyusunan skripsi, dan sidang akhir skripsi.

Berikut maktriks dari jadwal penelitian ini:

Tabel 1. 3 Matriks Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Keterangan	Tahun 2023												Tahun 2024																				
	Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret	April				Mei				Juni			
Minggu Ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																															
Pengumpulan Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																					
Pembuatan Usulan Penelitian													■	■	■	■																	
Sidang Usulan Penelitian																						■											
Revisi Usulan Penelitian																							■	■	■								
Penyusunan Skripsi																											■	■	■				
Sidang Skripsi																														■			
Revisi Skripsi																																■	■